



Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



#Organisasi Berkualitas | Kerja Tuntas | Untuk Rakyat

Tahun 2020



bpbd.banggai@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2020 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2020 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi.

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bidang sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance* yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banggai.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2020 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Pemerintah Kabupaten Banggai.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, Amiin.

Luwuk, 01 Februari 2021

Kepala

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Banggai,



Ir. H. RENSLY SAADJAD, MM

Pembina Utama Muda IV/c

Nip. 19620317 199003 1 012

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan perwujudan instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. SAKIP dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Selain itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi menempatkan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu area perubahan dan menempatkan instansi pemerintah yang akuntabel menjadi salah satu sasaran utama reformasi birokrasi.

LKjIP BPBD Tahun 2020 ini untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan urusan pemerintahan tahun anggaran 2020 sesuai tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja sebagaimana visi dan misi organisasi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. Visi Kabupaten Banggai 2016 - 2021 adalah Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya". Untuk mewujudkan visi tersebut, pada tahun 2020 BPBD Kabupaten Banggai melaksanakan 10 program dengan 45 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 14.039.705.497,-.Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Tahun 2020 untuk mencapai 2 Sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber pembiayaan Program dan Kegiatan dari APBD dan APBN Tahun 2020 berjumlah Rp. 14.039.705.497,-terrealisasi Rp. 7.755.802.307,-dengan realisasi fisik 51,30% dan realisasi keuangan 55,24%.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

1. Persentase Penanganan Bencana Alam Tuntas dengan target 75%, sedangkan realisasinya 60% atau tercapai 80%.
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja/ SAKIP (Non IKU) dengan Target Nilai Predikat A.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja BPBD Kab. Banggai lebih baik dan akuntabel yaitu melakukan peningkatan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2020, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2020 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin)/Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja diawal tahun anggaran 2020.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan LkjiP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai merupakan salah satu dokumen pelaporan yang tidak dapat terlepas dari Subtansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunannya, yang dijabarkan dalam:

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;
- Peraturan Bupati Banggai Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.3 Isu Strategis

Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis wilayah NKRI memiliki kerawanan bencana yang tinggi disebabkan faktor alam dan Non alam. Kabupaten Banggai salah satu kawasan yang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap bencana ditinjau dari aspek kelembagaan, sosial ekonomi, demografi, infrastruktur dan fisik lingkungan.

Berdasarkan Data BPBD, Kabupaten Banggai memiliki kawasan rawan bencana diantaranya kawasan rawan gempa, banjir, abrasi pantai dan longsor. Hal tersebut merupakan tantangan bagi BPBD dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, terutama kegiatan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana berupa pengurangan risiko bencana. Penanganan Bencana masih menitikberatkan terhadap bencana alam, walaupun belum ditentukan lokasi kecamatan kawasan rawan bencana gempa, banjir, longsor dan abrasi pantai. Sehingga tantangan juga bagi BPBD untuk membuat secara lengkap dan detail analisis risiko bencana dan peta rawan bencana termasuk bencana alam, non alam dan sosial.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat perlu mengembangkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan agar terbangun suatu kondisi yang dapat meningkatkan ketahanan terhadap resiko bencana. Untuk mengurangi dampak dari bencana yang mungkin terjadi, Pemerintah Kabupaten Banggai mengambil langkah-langkah strategis dengan berpedoman kepada program PBB yaitu International Decade for Natural Disaster Reduction (IDNDR). Salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Banggai untuk mengurangi resiko bencana alam adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan antisipatif yang berbasis mitigasi bencana.

Salah satu Strategi Pembangunan Penanggulangan Bencana Nasional dan Kabupaten Banggai yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Rencana Sstrategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (5 Tahun) dengan VISI Kepala Daerah Bupati Banggai yaitu ” Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Melalui Basis Kemaritiman Kearifan Lokal dan Budaya ”

1.4 Struktur Organisasi

Badan adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Penanggulangan Bencana yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kegiatan penanganan dibidang Penanggulangan Bencana. Tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu

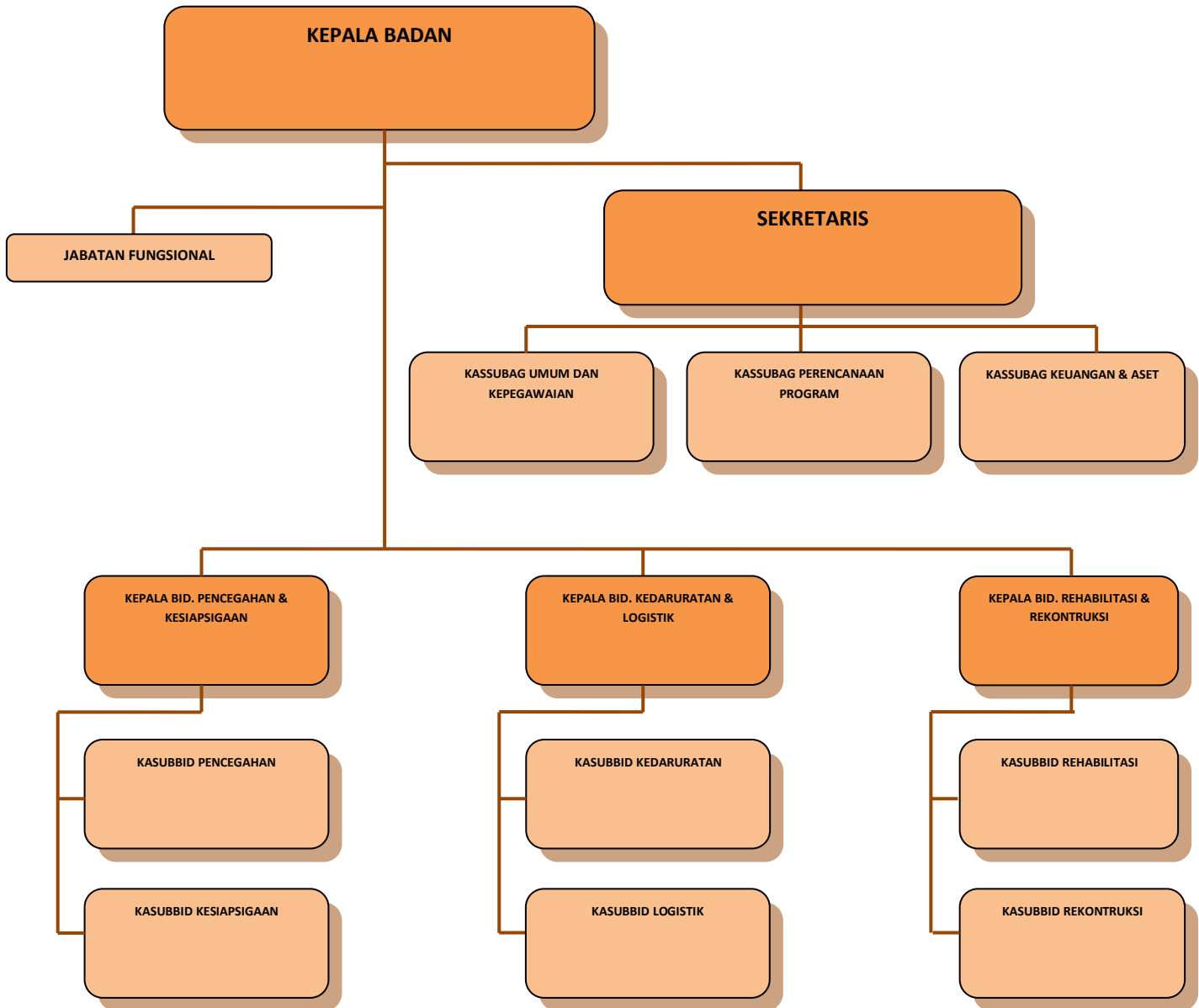
pada UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banggai memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, meliputi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program;
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, meliputi :
 - a. Sub Bidang Pencegahan; dan
 - b. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, meliputi :
 - a. Sub Bidang Kedaruratan; dan
 - b. Sub Bidang Logistik.
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meliputi :
 - a. Sub Bidang Rehabilitasi; dan
 - b. Sub Bidang Rekonstruksi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi

BADAN PENANGGULANGAN BANCANA DAERAH KABUPATEN BANGGAI



1.5 Tugas dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banggai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banggai.

• Tugas Pokok

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai mempunyai tugas pokok :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, restrukturisasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

• Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banggai mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.
- b. Pengkomandoan melalui pengerahan sumber daya manusia, pelatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan tanggap darurat
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana, dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Kepala Badan

BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok Badan secara terintegrasi, meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Menyelenggarakan fungsi perumusan bahan kebijakan teknis penanggulangan bencana; dan penyelenggaraan koordinasi dan pengkomandoan dalam melaksanakan penanggulangan bencana.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, Adapun Sekretariat mempunyai fungsi : Dalam hal ini, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana Badan. Dan untuk pelaksanaan kegiatannya dibantu oleh:

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi dilingkungan BPBD
- b. Pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD
- c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandain, perlengkapan, dan rumah tangga BPBD
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana, dan
- e. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD

1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kelembagaan, ketatalaksanaan, umum dan kepegawaian, dan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan, dan
- b. Pelaksanaan administrasi dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan, rumah tangga, kehumasan, dan perlengkapan.

2) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program

Mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, perencanaan, penyusunan program dan evaluasi, dan memiliki fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan program kerja Subbagian Perencanaan Program dan Evaluasi, Sekretariat, serta Bidang Pencegahan dan Kesiapsigaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi.
- b. Penyusunan bahan perencanaan, program dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan Program dan Evaluasi, Sekretariat, serta Bidang Pencegahan dan Kesiapsigaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi.

3) Kepala Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan, dan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Badan
- b. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan Badan.

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pejabat yang memiliki Tugas Pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan kebencanaan, dimana mempunyai fungsi :

- a. pengkajian bahan kebijakan teknis pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan kebencanaan,
- b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan kebencanaan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu oleh dua Kepala Seksi yaitu :

1) Kepala Seksi Pencegahan dan Mitigasi

Memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi pencegahan kebencanaan, dan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi pencegahan kebencanaan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pencegahan kebencanaan; dan
- c. pelaksanaan pengelolaan sistem data dan informasi kebencanaan.

2) Kepala Seksi Kesiapsiagaan

Memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan, dan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan,
- b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kesiapsiagaan kebencanaan.

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pejabat yang Memiliki Tugas Pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, dan fasilitasi kedaruratan dan logistik, dimana mempunyai fungsi :

- a. pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kedaruratan dan logistic kebencanaan,
- b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kedaruratan dan logistik kebencanaan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dibantu oleh dua Kepala Seksi yaitu :

1) Kepala Seksi Penanganan Kedaruratan

Memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kedaruratan kebencanaan, dan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi fasilitasi kedaruratan bencana
 - b. Penyusunan dan pengolahan data kegiatan kedaruratan.
- 2) Kepala Seksi Pengadaan Logistik
- Memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi kedaruratan kebencanaan, dan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi fasilitasi kedaruratan bencana
 - b. Penyusunan dan pengolahan data kegiatan kedaruratan

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pejabat yang memiliki Tugas Pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan, dimana mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi kebencanaan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu oleh dua Kepala Seksi yaitu :

1) Kepala Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana

Memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi kebencanaan, dan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi kebencanaan,
- b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data rehabilitasi kebencanaan

2) Kepala Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana

Memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rekonstruksi kebencanaan, dan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan dan kebijakan teknis, koordinasi dan fasilitasi rekonstruksi kebencanaan
- b. Penyusunan dan pengolahan data rekonstruksi kebencanaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai didukung dengan jumlah pegawai sampai dengan akhir Desember Tahun 2020 mencapai 26 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Pendidikan

Kualifikasi Pendidikan				Jumlah
SMP	SMA / SMK	S1	S2	
1	7	16	2	26

Sumber : Data Sekunder BPBD Kab. Banggai tahun 2020

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

Pangkat Golongan					Jumlah
Golongan I	Golongan II	Golongan III	Golongan IV	Non Golongan/Honorer	
1	6	15	4	26	48

Sumber : Data Sekunder BPBD Kab. Banggai Tahun 2020

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan/Eselonisasi

Jabatan/Eselonisasi				Jumlah
Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Non Eselon/Fungsional	
1	4	9	12	26

Sumber : Data Sekunder BPBD Kab. Banggai Tahun 2020

1.6 Dukungan Kinerja Terhadap Renstra

Mengingat permasalahan pokok dalam bidang penanggulangan bencana daerah tersebut secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat luas, khususnya menunjang terpenuhinya kebutuhan dan mendapat pelayanan penanggulangan bencana serta pemulihan akibat bencana yang termaktub dalam Renstra Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

- Misi 1 : **”Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang Beribawa”**
 Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Kabupaten Banggai.
 Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola BPBD yang baik, bersih dan akuntabel
- Misi 6 : **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Daerah”**
 Tujuan : Meningkatkan Penanggulangan Bencana Daerah
 Sasaran : Menurunnya Risiko dan Dampak Bencana Alam.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banggai disusun berdasarkan Rencana Strategis tahun 2016-2021, Salah satu Strategi Pembangunan Penanggulangan Bencana Nasional dan Kabupaten Banggai yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dan dituangkan dalam Rencana Srategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (5 Tahun) dengan *VISI Kepala Daerah Bupati Banggai* yaitu *"Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Melalui Basis Kemaritiman Kearifan Lokal dan Budaya"*, yang dijabarkan pada Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah BPBD Kab. Banggai.

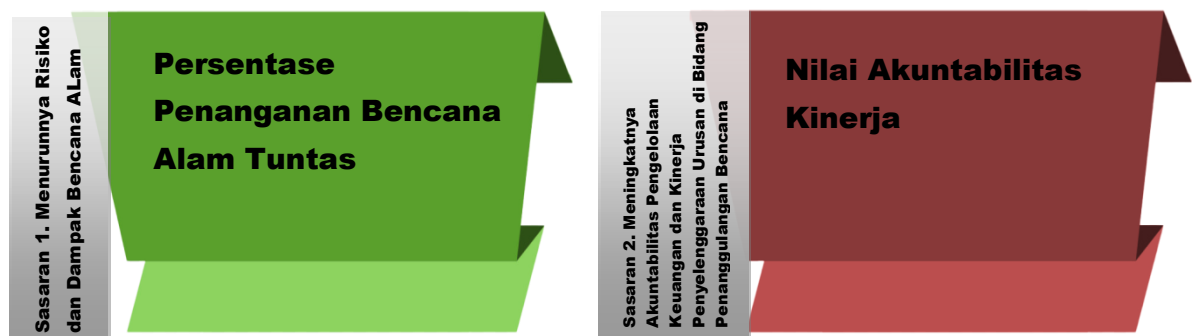
a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banggai sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Adapun Tujuan yang akan dicapai oleh BPBD Kab. Banggai adalah :



b. Sasaran

sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun sasaran BPBD kab. Banggai sebagai berikut :



Indikator Kinerja Utama (IKU) telah ditetapkan penjelasan dan formulasi perhitungan adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penanganan Bencana Alam tuntas} = \frac{\text{Jumlah Penanganan Pra Bencana (s/d tahun berjalan), Tanggap Darurat, Pasca Bencana} \times 100\%}{\text{Jumlah Kejadian Bencana (Tahun - n)}}$$

Penjelasan rumus perhitungan IKU yaitu penanganan bencana tuntas meliputi penanganan bencana pada tahap Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana dibagi dengan total kejadian bencana. Apabila salah satu tahapan belum atau belum pernah dilaksanakan maka tidak termasuk dalam hitungan penanganan bencana tuntas. Bencana yang tidak membutuhkan penanganan pemulihan masuk dalam perhitungan bencana tuntas dan apabila penanganan pemulihan yang dilakukan oleh instansi terkait masuk dalam perhitungan penanganan pemulihan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banggai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Banggai Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banggai.

c. Strategi dan Kebijakan

Visi dan misi yang telah ditetapkan pada RPJMD dan dijelaskan tujuan serta sarannya perlu dielaborasi ke dalam upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi dan arah kebijakan BPBD yang akan dilaksanakan hingga tahun 2021.

Strategi dan Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran dari penjabaran Misi Keenam, yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Daya Saing Daerah”.

Untuk mencapai *tujuan dari Misi keenam* perlu dirancang Strategi yaitu meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat serta penanggulangan bencana, dan dijabarkan pada arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan pencegahan terjadinya bencana; diprioritaskan pada peningkatan pelayanan pencegahan bencana yang berbasis masyarakat.
- b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk peningkatan pelayanan kedaruratan bencana.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana. diprioritaskan pada peningkatan pelayanan penanggulangan rehabilitasi – rekonstruksi akibat bencana yang berbasis Pemulihan sosial ekonomi masyarakat.
- d. Meningkatkan kapasitas sumber daya lembaga penanggulangan bencana daerah, telah dirancang strategi sebagai berikut: (1) Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran; (2) Meningkatkan kapasitas sumber daya sarana dan prasarana aparatur; (3) Meningkatkan kapasitas sumber daya dan disiplin aparatur; (4) Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban kinerja lembaga.

Penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang pada RPJMD yaitu dapat dilihat pada Tabel berikut:

Visi :	Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya		
Misi :	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Daya Saing Daerah		
Tujuan	Sasaran	Startegi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia Kabupaten Banggai	Meningkatan perlindungan dan kesejahtraan sosial masyarakat serta penanggulangan bencana.	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana (alam dan sosial) pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pascabencana.

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negeradan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatkan Penanggulangan Bencana Daerah	Menurunnya Risiko dan Dampak Bencana Alam	Persentase Penanganan Bencana Alam Tuntas	75 %
Meningkatkan Tata Kelola BPBD yang Baik, Bersih Dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan di Bidang Penanggulangan Bencana	Nilai Predikat Akuntabilitas Kinerja /SAKIP (Non IKU)	A

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Penjabaran dalam Penyusunan rencana strategis selanjutnya dijabarkan pada Dokumen Rencana Kerja (RENJA) yang pada umumnya memuat Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. Pada implementasinya Perjanjian kinerja menjadi bagian dari komitmen Perangkat Daerah dalam melaksanakan Rencana Kerja yang disusun pada tahun berkenan. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Banggai tahun 2020 merupakan target tahun keempat dari Renstra BPBD Kabupaten

Banggai dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja BPBD Kabupaten Banggai tahun 2020 dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). BPBD Kabupaten Banggai telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel. 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1.	Menurunnya Risiko dan Dampak Bencana Alam	Persentase Penanganan Bencana Alam Tuntas	75 %	Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bid. Kedaruratan dan Logistik, Bid. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan di Bidang Penanggulangan Bencana	Nilai Predikat Akuntabilitas Kinerja /SAKIP (Non IKU)	A	Sekretariat

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh ASN di lingkungan BPBD Kabupaten Banggai, mulai dari level eselon II sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya.

Untuk mewujudkan kinerja tersebut, BPBD Kabupaten Banggai mendapat dukungan anggaran dari APBD dan APBN (Dana Hibah) sebesar Rp. 14.039.705.497,- (*Empat Belas Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) yang digunakan untuk melaksanakan 45 kegiatan yang terangkum dalam 10 program sebagai berikut:

Tabel. 2.3 Anggaran BPBD Kab. Banggai Tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	380.825.828
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	45.800.000
3.	Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	1.542.000
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.992.000
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100.684.400
6.	Pengembangan Sistem Informasi/Data	7.356.000
7.	Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	25.011.500
8.	Pencegahan Mitigasi dan Kesiapsiagaan	81.006.809
9.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	12.994.569.460
10.	Kedaruratan dan Logistik	397.917.500
Total		14.039.705.497

Anggaran tersebut diatas selanjutnya dimanfaatkan untuk mendukung terwujudnya 2 (dua) sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Banggai tahun 2020 dengan alokasi sebagai berikut:

Tabel 2.4 Pengalokasian Anggaran Berdasarkan Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)
Menurunnya Risiko dan Dampak Bencana Alam	13.473.493.769
Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan di Bidang Penanggulangan Bencana	566.211.728

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pun tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *Actuating* dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, Program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2020

A.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini.

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategis yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*Performance Improvement*).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2020

No	PERSENTASE PENCAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75% sampai 100%	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Pengukuran capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2020 dinyatakan “Baik”, karena rata-rata capaiannya di atas 75% dari target. Meskipun masih terdapat beberapa indikator yang tidak berhasil diantaranya karena ada rasionalisasi anggaran sehingga dilakukan penyesuaian target kinerja.

A.2. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Hasil pengukuran Kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai tahun 2020 disajikan sebagai berikut :

3.2 Target capaian kinerja dan realisasi kinerja Tahun 2020

Sasaran 1. Menurunkan Risiko dan Dampak Bencana Alam

Capaian kinerja sasaran meningkatnya Persentase Penanganan Bencana Alam Tuntas dijabarkan dalam Indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.2.1 Pencapaian Kinerja Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5
Menurunkan Risiko dan Dampak Bencana Alam	Persentase Penanganan Bencana Alam Tuntas	75%	60%	80%

Hasil perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 pada tabel berikut:

No	Bencana	Penanganan Pra Bencana	Tanggap Darurat	Penanganan Pemulihan Pasca Bencana	Keterangan	Status
1.	Abrasi Pantai Kec. Bunta	Sosialisasi Kewaspadaan masyarakat terhadap bencana tahun 2017	Distribusi Logistik dan Pembuatan tanggul pasir	-	Tidak Perlu Penanganan Pasca Bencana karena bencana bersifat sementara	Tuntas
2.	Banjir Ds. Purwo Agung Kec. Masama	Sosialisasi Kewaspadaan masyarakat terhadap bencana tahun 2017 dan Pemasangan Papapn Himbauan Rawan Bencana/Jalur Evakuasi Kec. Masama Tahun 2018	Distribusi Logistik	-	Tidak Perlu Penanganan Pasca Bencana karena bencana bersifat sementara	Tuntas
3.	Banjir Ds. Minang Andala	Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tahun 2017, Sosialisasi	Distribusi	-	Tidak Perlu Penanganan Pasca bencana karena	Tuntas

	Kec. Masama	Kewaspadaan Masyarakat Terhadap Bencana Tahun 2017 dan Pemasangan Papan Hibauan Rawan Bencana/Jalur Evakuasi Kec. Masama Tahun 2018	Logistik		bencana bersifat sementara	
4.	Banjir Ds. Bantayan Kec. Luwuk Timur	Pembangunan Tanggul Tanah/Pengaman Banjir Ds. Bantayan Kec. Luwuk Timur Tahun 2017	Distribusi Logistik	-	Tidak Perlu Penanganan Pasca bencana karena bencana bersifat sementara	Tuntas
5.	Banjir Ds. Minang Andala Kec. Masama	Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tahun 2017, Sosialisasi Kewaspadaan Masyarakat Terhadap Bencana Tahun 2017 dan Pemasangan Papan Hibauan Rawan Bencana/Jalur Evakuasi Kec. Masama Tahun 2018	Distribusi Logistik	-	Tidak Perlu Penanganan Pasca bencana karena bencana bersifat sementara	Tuntas
6.	Banjir Ds. Bahari Makmur Kec. Masama	Kegiatan Simulasi Penanggulangan Bencana Tahun 2018	Distribusi Logistik	-	Tidak Perlu Penanganan Pasca bencana karena bencana bersifat sementara	Tuntas
7.	Banjir Ds. Ondolu Kec. Balantak Selatan	Belum ada Penanganan Pra Bencana	Distribusi Logistik	-	Tidak Perlu Penanganan Pasca bencana karena bencana bersifat sementara	Tidak Tuntas
8.	Banjir Ds. karanganyar Kec. Moilong	Belum ada Penanganan Pra Bencana	Distribusi Logistik	-	Tidak Perlu Penanganan Pasca bencana karena bencana bersifat sementara	Tidak Tuntas
9.	Banjir Ds. Saluan Kec. Moilong	Belum ada Penanganan Pra Bencana	Distribusi logistik	-	Belum ada Penanganan Pra Bencana	Tidak Tuntas
10.	Banjir Ds. Toili Kec. Moilong	Belum ada Penanganan Pra Bencana	Distribusi logistik	-	Tidak membutuhkan penanganan pemulihan	Tidak Tuntas

Persentase pencapaian indikator kinerja utama (IKU) untuk triwulan IV Tahun 2020 yaitu 60% dengan rincian total penanganan bencana tuntas sebanyak 6 (enam) Penanganan Bencana Tuntas dibagi dengan total kejadian bencana yaitu sebanyak 10 (sepuluh) kali kejadian bencana.

Sasaran 2. Meningkatkan tata kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang baik, bersih dan akuntabel

Capaian kinerja sasaran meningkatkan tata Kelola Badan penanggulangan Bencana Daerah di Jabarkan dalam Indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.2.2 Pencapaian Kinerja Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (Non IKU)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan di Bidang Penanggulangan Bencana	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	A		

3.3 Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2019 dan beberapa tahun Terakhir

Adapun realisasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai dari tahun 2017 sampai dengan 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Data Pencegahan Mitigasi dan Kesiapsiagaan

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Penyuluhan dan Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat terhadap bencana	350 Org	-	-	-
2	Koordinasi dukungan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan pra bencana	-	50 Orang	2 Kegiatan	2 Kegiatan
3	Pembentukan dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana	-	1 Desa	1 Desa	0 Desa
4	Survey dan Monitoring Wilayah Rawan Bencana	-	-	1 Laporan	1 Laporan
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana	-	-	-	-
6	Pengadaan Rambu Peringatan Rawan Bencana	-	-	8 Buah	0 Buah

Sumber : Bidang Pencegahan Mitigasi dan Kesiapsiagaan

Tabel 3.3 Data Kedaruratan dan logistik

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam	7 Jenis	4 jenis	4 Jenis	0 Jenis
2	Penanganan tanggap darurat	3 Jam	3 Jam	14 Kali	10 Kali
3	Pemenuhan kebutuhan dasar tentang sandang pangan dan papan bagi korban bencana alam	1 Paket	1 Paket	3 Jenis	3 Jenis
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman Korban Bencana Alam	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis
5	Simulasi Penanggulangan Bencana	160 Org	160 Org	160 Orang	0 Orang
6	Peningkatan layanan penanggulangan bencana	-	-	0 Orang	15 Orang

7	Koordinasi Dukungan kegiatan kedaruratan dan logistik	-	-	0 Kegiatan	1 Kegiatan
8	Penguatan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana	-	-	-	-
9	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan
10	Operasional Penanggulangan Bencana	-	75 Orang	75 Orang	0 Orang

Sumber : Bidang Kedaruratan dan Logistik

Tabel 3.3 Data Rehabilitasi dan Rekonstruksi

No	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Perbaikan Daerah Rawan Bencana	10 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	4 Jenis
2	Monitoring dan Evaluasi Kerusakan Pasca Bencana	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
3	Peningkatan Kapasitas Pengkajian dan Penilaian Kebutuhan Pasca Bencana	-	-	0 Dokumen	1 Dokumen

Sumber : Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Sasaran 1. Menurunnya Risiko dan Dampak Bencana Alam

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dan 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah terlihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Tahun (n-1)	Tahun (n)
1.	Menurunnya Risiko dan Dampak Bencana Alam	Persentase Penanganan Bencana Alam Tuntas	75	60	60

Sasaran 2. Meningkatnya tata kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang baik, bersih dan akuntabel

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dan 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Tahun (n-1)	Tahun (n)
1	Meningkatnya tata kelola BPBD yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	A	BB	

Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2020 dengan Target RENSTRA

Keterkaitan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis RENSTRA (Tahun 2016-2021), BPBD Kabupaten Banggai mempunyai peran untuk melaksanakan Misi Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 yaitu:

Misi ke I : Menciptakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan Yang Berwibawa, sebagaimana *Tujuan ke – I* pada RENSTRA yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani. dengan *Sasaran ke 1* Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Banggai dengan Indikator Kinerja Sekaligus upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui peningkatan disiplin ASN dan sinkronisasi dokumen perencanaan.

Misi ke VI : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Daerah, sebagaimana *Tujuan ke – I* pada RENSTRA yaitu Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia dengan *Sasaran ke 1* Meningkatnya kualitas pembangunan manusia Kabupaten Banggai dengan Indikator Kinerja Menurunkan Risiko dan Dampak Bencana Alam Penanggulangan Bencana Daerah, Persentase Penanganan Bencana Alam Tuntas Kabupaten Banggai sampai dengan Tahun 2020 telah merealisasikan pencapaian Target yang Signifikan sebagaimana tabel berikut:

Sasaran 1. Menurunkan Risiko Dampak Bencana Alam

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Target RENSTRA	Tahun 2020	
					Target	Realisasi
1.	Menurunkan Risiko Dampak Bencana Alam	Persentase Penanganan Bencana Alam Tuntas	<ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan Mitigasi & Kesiapsiagaan - Kedaruratan dan logistis - Rehabilitasi dan Rekonstruksi 	80%	75%	60%

Sasaran 2. Meningkatnya tata kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang baik, bersih dan akuntabel

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Target RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RENSTRA	Tahun 2020	
				Target	Realisasi
1	Meningkatnya tata kelola BPBD yang baik, bersih dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	A	A	

Analisis Penyebab Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi

Secara umum capaian kinerja sasaran dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai pada tahun anggaran 2020 rata-rata pencapaian target kerjanya dapat terealisasi

dengan cukup baik. Beberapa masalah yang menjadi perhatian bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

- Adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional, sehingga mengharuskan OPD untuk tidak melaksanakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang.
- Belum ada kebijakan yang menunjang kegiatan Penanggulangan Bencana secara maksimal.
- Terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran penanggulangan Bencana.
- Peningkatan SDM Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan bencana yang belum memadai.

Adapun upaya perbaikan untuk pemecahan masalah Badan penanggulangan Bencana Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

- Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kebencanaan maupun administrasi perkantoran dengan mematuhi protokol kesehatan yaitu, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan.
- Perlu dibangunnya komitmen dukungan pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan Penanggulangan Bencana.
- Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana & prasarana penanggulangan bencana.
- Perlu peningkatan SDM Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan bencana.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Untuk mencapai tujuan sasaran strategis dan RENSTRA diperlukan dukungan sumberdaya terutama dukungan anggaran. Anggaran yang telah disetujui akan digunakan semaksimal mungkin untuk melaksanakan program dan kegiatan. Dengan penggunaan sumberdaya anggaran ini akan diketahui apakah capaian sasaran dan RENSTRA itu dilaksanakan secara efisien atau tidak.

Analisis program / kegiatan penunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

A. Program Pencegahan Mitigasi dan Kesiapsiagaan

Capaian indikator kinerja Program Pencegahan Mitigasi dan Kesiapsiagaan sebagai berikut : Persentase Desa Tangguh Bencana yang dibentuk sebesar 0 persen dari target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 50 persen. Alokasi anggaran Program Pencegahan Mitigasi dan Kesiapsiagaan sebesar Rp. 81.006.809,- dengan realisasi sebesar Rp. 81.006.809,- setara dengan 100 %. Hal ini disebabkan Rasionalisasi anggaran dan adanya bencana non alam/epidemi Covid-19 yang mengharuskan OPD untuk tidak melaksanakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang seperti Pembentukan Desa Tangguh Bencana, Pelatihan Relawan Bencana, Penyuluhan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana, simulasi penanggulangan bencana dan Gladi Kesiapsiagaan Bencana. Dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyuluhan dan Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Terhadap Bencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- dan realisasi Rp. 0,- atau setara 0%. Output kegiatan ini adalah peserta yang mengikuti penyuluhan. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran dan adanya bencana non alam/epidemi

Covid-19 yang mengharuskan OPD untuk tidak melaksanakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang seperti Pembentukan Desa Tangguh Bencana, Pelatihan Relawan Bencana, Penyuluhan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana, simulasi penanggulangan bencana dan Gladi Kesiapsiagaan Bencana.

2. Kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- dan realisasi Rp. 0,-. Output kegiatan ini adalah desa tangguh bencana yang dibentuk. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran dan adanya bencana non alam/epidemi Covid-19 yang mengharuskan OPD untuk tidak melaksanakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang seperti Pembentukan Desa Tangguh Bencana, Pelatihan Relawan Bencana, Penyuluhan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana, simulasi penanggulangan bencana dan Gladi Kesiapsiagaan Bencana.
3. Kegiatan Koordinasi Dukungan Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pra Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.143.559,- dan realisasi sebesar Rp. 75.143.559,- atau setara dengan 100%. output kegiatan ini adalah Keikutsertaan BPBD Kab. Banggai dalam kegiatan Rakornas BNPB (Kegiatan Rakornas BNPB dilaksanakan sebelum adanya Kepres RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional) .
4. Kegiatan Survey dan Monitoring Wilayah Rawan Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.863.250,- dan realisasi sebesar Rp. 5.863.250,- atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah Laporan Survey Monitoring Wilayah Rawan Bencana.
5. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasana Mitigasi Bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau setara 0%. Output kegiatan ini adalah pembuatan Rambu Peringatan Rawan Bencana. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya rasionalisasi anggaran.

B. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Capaian indikator kinerja Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai berikut: Persentase Penanganan Pascabencana Sesuai Standar Kelayakan dan Keselamatan sebesar 51,72 persen dari target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 70 persen. Alokasi anggaran Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebesar Rp. 12.994.569.460,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.724.678.532,- setara dengan 51,74%. Hal ini disebabkan pada pelaksanaan kegiatan perbaikan daerah rawan bencana mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemerintah Pusat pada tanggal 9 september 2020 sesuai Perjanjian Hibah Daerah Nomor : PHD-44/MK.7/DTK.03/2020 pada tanggal 10 agustus 2020 dan dilaksanakan pada 4 (empat) paket pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan menggunakan Kontrak Tahun Jamak, sehingga terdapat sisa kontrak dan sisa anggaran yang akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Dan dapat dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perbaikan Daerah Rawan Bencana, Pada Anggaran Perubahan Tahun 2020 Pagu Rp. 520.000.000,- dan Realisasi Rp 519.550.000,- , persentase keuangan 99,91%. Hal ini disebabkan pada pekerjaan pembangunan tanggul penahan banjir memiliki sisa kontrak sehingga terdapat selisih anggaran. Persentase Kegiatan 100%, output kegiatan ini adalah

Infrastruktur perbaikan rawan bencana antara lain Tanggul Pengaman Banjir 3 (tiga) unit di Desa Kamiwangi Kec. Toili Barat, Desa Sentral Sari Kec. Toili dan Desa Mekar Sari Kec. Toili Barat.

2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kerusakan Pasca Bencana, Pada Anggaran Perubahan Tahun 2020 Pagu Rp. 10.000.000,- dan Realisasi Rp. 10.000.000,- , persentase keuangan 100%. Persentase Kegiatan 100%, output kegiatan ini adalah laporan monitoring dan evaluasi kerusakan pasca Bencana.
3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengkajian dan Penilaian Kebutuhan Pasca Bencana, Pada Anggaran Perubahan Tahun 2020 Pagu Rp. 5.000.000,- dan Realisasi Rp. 5.000.000,- , persentase keuangan 100%. Persentase Kegiatan 100%, output kegiatan ini adalah Dokumen JITUPASNA.

C. Program Kedaruratan dan Logistik

Pencapaian indikator kinerja program kedaruratan dan logistik sebagai berikut: Persentase Kejadian Bencana yang ditangani sesuai Waktu Tanggap sebesar 71,43 persen dari target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 85 persen. Alokasi anggaran Program Kedaruratan dan Logistik adalah sebesar Rp. 397.917.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 390.313.000,- setara dengan 98,08%. Hal ini disebabkan pada kegiatan Peningkatan Layanan Penanggulangan Bencana pada belanja Honorarium Petugas TRC terdapat selisih sisa anggaran disebabkan penyesuaian pembayaran Honor TRC pada 1 (satu) anggota TRC yang telah diberhentikan. Dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman Korban Bencana Alam. Alokasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.000.000,- atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah Biaya Pengiriman Peralatan Evakuasi.
2. Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat. Alokasi anggaran sebesar Rp. 6.285.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 6.285.000,- atau setara dengan 100%. Output kegiatan ini adalah jumlah kali penanganan tanggap darurat bencana yaitu 10 kali.
3. Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tentang Sandang Pangan dan Papan Bagi Korban Bencana Alam. Alokasi anggaran sebesar Rp. 23.506.000 dan Realisasi sebesar Rp. 23.503.000,- , atau setara dengan 99,99%. Hal ini disebabkan pada belanja Perlengkapan Stimulan disesuaikan dengan kebutuhan sandang pangan dan papan untuk korban bencana alam yang terkena dampak bencana. Output kegiatan ini adalah Logistik (sandang, pangan dan papan) yang tersalurkan kepada korban bencana.
4. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman Korban Bencana Alam. Alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- dan Realisasi sebesar Rp. 0,- , atau setara dengan 0%. Hal ini disebabkan oleh rasionalisasi anggaran.
5. Kegiatan Simulasi Penanggulangan Bencana. Alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0%. Hal ini disebabkan oleh rasionalisasi anggaran dan adanya bencana non alam/epidemi Covid-19 yang mengharuskan OPD untuk tidak melaksanakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang seperti

Pembentukan Desa Tangguh Bencana, Pelatihan Relawan Bencana, Penyuluhan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana, simulasi penanggulangan bencana dan Gladi Kesiapsiagaan Bencana.

6. Kegiatan Peningkatan Layanan Penanggulangan Bencana. Alokasi anggaran sebesar Rp. 358.400.000,- dan Realisasi sebesar Rp. 350.800.000,- , atau setara dengan 97,88%. Hal ini disebabkan pada belanja Honorarium Petugas TRC terdapat selisih sisa anggaran disebabkan penyesuaian pembayaran Honor TRC pada 1 (satu) anggota TRC yang telah diberhentikan. output kegiatan ini yaitu Honorarium Petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana.
7. Kegiatan Koordinasi Dukungan Kegiatan Kedaruratan dan Logistik. Alokasi anggaran sebesar Rp. 3.726.500,- dan Realisasi sebesar Rp. 3.725.000,- , atau setara dengan 99,96%. Hal ini disebabkan pada belanja perjalanan dinas luar daerah menggunakan *add cost* sehingga terdapat selisih sisa anggaran. output kegiatan ini yaitu kegiatan koordinasi pengurusan bantuan logistik dan peralatan kedaruratan dan logistik.
8. Kegiatan Penguatan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana. Alokasi anggaran Rp. 0,- dan realisasi sebesar Rp. 0,-atau setara 0%. Hal ini disebabkan oleh rasionalisasi anggaran dan adanya bencana non alam/epidemi Covid-19 yang mengharuskan OPD untuk tidak melaksanakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang seperti Pembentukan Desa Tangguh Bencana, Pelatihan Relawan Bencana, Penyuluhan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana, simulasi penanggulangan bencana dan Gladi Kesiapsiagaan Bencana.

A. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2020 BPBD mendapat anggaran sebesar **Rp. 17.488.730.330,-** yang dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) : **Rp. 3.449.024.833,-**dan Belanja Langsung (BL) : **Rp. 14.039.705.497,-**

Secara keseluruhan penyerapan anggaran BPBD Kabupaten Banggai yang bersumber dari APBD dan APBN untuk Kabupaten Banggai Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Rekapitulasi Realisasi Anggaran BPBD Kabupaten Banggai Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	3.449.024.833	3.114.468.362	90,30
2	Belanja Langsung	14.039.705.497	7.755.802.307	55,24
	- Belanja Pegawai	619.341.400	569.194.000	91,90
	- Belanja Barang dan Jasa	1.394.114.097	1.066.553.432	76,50
	- Belanja Modal	12.026.250.000	6.120.054.875	50,88
	Total	17.488.730.330	10.870.270.669	62.16

Total anggaran untuk mewujudkan kinerja BPBD tahun 2020 sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan adalah sebesar **Rp. 14.039.705.497** dengan realisasi sebesar **Rp 7.755.802.307,00** atau **55,24%**. Adapun rincian realisasi anggaran tersebut sebagai berikut.

Tabel 3.13 Realisasi Program dan Kegiatan

NO	Uraian Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		
			Keuangan		Fisik
			Rp	%	%
1	2	3	4	5	6
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14.039.705.497			
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	380.825.828	375.453.966	98,64	
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	3.600.000	3.600.000	100	100
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.	41.000.000	37.716.311	91,99	91,99
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional.	-	-	-	-
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	15.000.000	14.998.225	99,99	100
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor.	20.000.000	20.000.000	100	100
1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	4.728.000	4.728.000	100	100
1.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	-	-	-	-
1.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan.	-	-	-	-
1.9	Penyediaan Makanan dan Minuman.	11.765.000	11.715.000	99,58	100
1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.	33.201.472	33.166.430	99,89	100
1.11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.	135.131.356	135.130.000	100	100
1.12	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	116.400.000	114.400.000	98,45	98,45
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	45.800.000	45.793.400	99,89	
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.	-	-	-	-
2.2	Pengadaan Meubelair	-	-	-	-
2.3	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	-	-	-	-
2.4	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	45.800.000	45.793.400	99,99	100
2.5	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor.	-	-	-	-
2.6	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor.	-	-	-	-
2.7	Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Listrik	-	-	-	-
III	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	1.542.000	1.500.000	97,82	
3.1	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	1.542.000	1.500.000	97,28	100
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4.992.000	4.896.000	98,08	
4.1	Pembinaan dan Pemantauan Kinerja Aparatur.	4.992.000	4.896.000	98,08	100
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	100.684.400	99.797.500	99,12	
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	16.520.000	16.360.700	99,04	100
5.2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1.632.000	1.632.000	100	100
5.3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.	4.512.900	4.484.000	99,36	100
5.4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD.	47.907.500	47.565.900	99,29	100
5.5	Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah	9.556.000	9.436.800	98,75	100
5.6	Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai(OPD)	20.556.000	20.318.100	98,84	100
VI	Program Pengembangan Sistem Informasi/Data	7.356.000	7.152.100	97,23	
6.1	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	7.356.000	7.152.100	97,23	100

VII	Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan.	25.011.500	25.011.000	100	
7.1	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	25.011.500	25.011.000	100	100
VIII	Program Pencegahan Mitigasi dan Kesiapsiagaan.	81.006.809	81.006.809	100	
8.1	Penyuluhan dan Peningkatan Kewaspadaan terhadap Masyarakat	-	-	-	-
8.2	Koordinasi Dukungan Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Prabencana.	75.143.559	75.143.559	100	100
8.3	Pembentukan dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana	-	-	-	-
8.4	Survey dan Monitoring Wilayah Rawan Bencana.	5.863.250	5.863.250	100	100
8.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana	-	-	-	-
IX	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	12.994.569.460	6.724.678.532	51,74	
9.1	Perbaikan Daerah Rawan Bencana.	12.990.000.000	6.720.109.532	51,73	47,46
9.2	Monitoring dan Evaluasi Kerusakan Pasca Bencana	3.284.460	3.284.000	99,99	100
9.3	Peningkatan Kapasitas Pengkajian dan Penilaian Kebutuhan Pasca Bencana	1.285.000	1.285.000	100	100
X	Program Kedaruratan dan Logistik.	397.917.500	390.313.000	98,08	
10.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk Dari Ancaman Korban Bencana Alam.	6.000.000	6.000.000	100	100
10.2	Penanganan Tanggap Darurat	6.285.000	6.285.000	100	100
10.3	Pemenuhan Kebutuhan Dasar tentang Sandang Pangan dan Papan bagi Korban Bencana Alam.	23.506.000	23.503.000	99,99	100
10.4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Evakuasi penduduk dari Ancaman Korban bencana Alam.	-	-	-	-
10.5	Simulasi Penanggulangan Bencana	-	-	-	-
10.6	Peningkatan Layanan Penanggulangan Bencana	358.400.000	350.800.000	97,88	97,88
10.7	Koordinasi Dukungan Kegiatan Kedaruratan dan Logistik	3.726.500	3.725.000	99,96	100
10.8	Penguatan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana	-	-	-	-

BAB V P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021, sehingga kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan operasional dari rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan di bidang Penanggulangan Bencana dengan meliputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan rekontruksi yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai tahun 2020 yang dapat kami sampaikan. Semoga laporan ini bisa menjadi evaluasi bersama atas program dan kegiatan selama satu tahun dan bisa menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja. Sehingga diharapkan laporan ini bisa menjadi landasan dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis berikutnya.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BANGGAI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. H. RENSLY SAADJAD, MM**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BANGGAI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **Ir. H. HERWIN YATIM, MM**
Jabatan : **BUPATI BANGGAI**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Luwuk,

2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


BUPATI BANGGAI,
Dr. Ir. H. HERWIN YATIM, MM

KEPALA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI

Ir. H. RENSLY SAADJAD, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620317 199003 1 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BANGGAI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
1.	Menurunnya Risiko dan Dampak Bencana Alam	Persentase Penanganan Bencana Alam Tuntas	Persentase (%)	75
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan di Bidang Penanggulangan Bencana	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Perdikat	A

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 380.825.828,-	APBD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 45.800.000,-	APBD
3. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Rp. 1.542.000,-	APBD
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 4.992.000,-	APBD
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 100.684.400,-	APBD
6. Program Pengembangan Sistem Informasi/Data	Rp. 7.356.000,-	APBD
7. Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	Rp. 25.011.500,-	APBD
8. Program Pencegahan Mitigasi dan Kesiapsiagaan	Rp. 81.006.809,-	APBD
9. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Rp. 12.994.569.460,-	APBD & APBN
10. Program Kedaruratan dan Logistik	Rp. 397.917.500,-	APBD
Total	Rp. 14.039.705.497	

Luwuk,

2020

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

**KEPALA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI**



INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Jabatan : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan dibidang penanggulangan bencana daerah meliputi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan dan pembinaan teknis, penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan kesekretariatan, pencegahan kesiapsiagaan, kedaruratan, rekonstruksi dan rehabilitasi berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan program/ kegiatan badan penanggulangan bencana daerah berdasarkan kebijakan umum daerah sehingga terciptanya program kerja secara sinergis;
 - b. Menyusun konsep sasaran pelaksanaan tugas penanggulangan bencana daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar kegiatan berjalan fektif dan efisien ;
 - c. Membina pelaksanaan tugas sekretaris dan kepala bidang dilingkungan badan penanggulangan bencana daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana meliputi kesekretariatan, pencegahan, kedaruratan rehabilitasi rekonstruksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penetapan kebijakan daerah;
 - e. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum, kepegawaian, keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kesekretariatan, Pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rahabilitasi dan rekonstruksi sesuai kebijakan umum daerah agar tercipta pelayanan yang optimal
 - h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Skretaris dan Kepala Bidang sesuai program yang telah ditetapkan agar dapat diukur pencapaian kinerjanya;
 - i. Mengarahkan pelaksanaan tugas sekretaris dan kepala bidang sesuai ketentuan dan rencana kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas;
 - j. Melaksananakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET (%)	SUMBER DATA
Menurunnya Risiko dan Dampak Bencana	Persentase Penanganan Bencana Alam Tuntas	$\frac{\text{Jumlah Penanganan Pra Bencana (s/d Tahun Berjalan), Tanggap Darurat (n) Penanganan Pasca Bencana (n)}}{\text{Jumlah Kejadian Bencana (Tahun - n)}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Penanganan Bencana Alam Tuntas adalah Penanganan Bencana Alam yang meliputi tahapan pada Pra Bencana, Tanggap Darurat</p>	75	Penanganan Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana

		<p>dan Pasca Bencana dibagi dengan total kejadian bencana pada tahun tersebut. Apabila salah satu tahapan belum dilaksanakan maka tidak termasuk dalam hitungan penanganan bencana tuntas.</p> <p><u>Tambahan Penjelasan :</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Bencana yang tidak membutuhkan penanganan pemulihan masuk dalam hitungan penanganan bencana tuntas.2. Penanganan pemulihan yang dilakukan oleh Instansi terkait masuk dalam hitungan penanganan bencana tuntas.		
--	--	--	--	--

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Ir. H. RENSLY SAADJAD, MM

Nip. 19620317 199003 1 012

**CAPAIAN KINERJA (PK) ESELON II
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2020**

NO	SASARAN KINERJA	INDOKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI S.D TRIWULAN					CAPAIAN (%)	KET
					I	II	III	IV			
1	Menurunnya Risiko dan Dampak Bencana Alam	Persentase Penanganan Bencana Alam Tuntas	75	%	50	60	60	60	80.00%		
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Penegelolaan Keuangan dan Kinerja Penyelenggaraan di Bidang Urusan Penanggulangan Bencana (Non IKU)	Nilai Predikat SAKIP	A	Perdikat					0%		

Luwuk, 01 Februari 2021

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI**



ii. H. BENSLEY SAADJAD, MM
Nip. 19620317 199003 1 012

**CAPAIAN KINERJA (PK) ESELON III
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2020**

NO	SASARAN PROGRAM	INDOKATOR PROGRAM	TARGET	SATUAN	REALISASI S.D TRIWULAN					CAPAIAN (%)	KETERANGAN
					I	II	III	IV			
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemanfaatan Administrasi Perkantoran	90	%	17.14	29.86	51	75	83.33%		
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi	90	%	11.11	11.11	14	75	83.33%		
3.	Meningkatnya Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Kinerja dan Keuangan	85	%	41.67	58.33	75	100	117.65%		
4.	Meningkatnya Data dan Informasi Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perangkat Daerah	80	%	100	100	100	100	125.00%		
5.	Meningkatnya ASN dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan BPBD	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	90	%	37.5	37.5	88	100	111.11%		
6.	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Secara Partisipatif didukung Data yang Up to Date	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Tepat Waktu, Tepat Proses dan Tepat Isi	75	%	100	100	100	100	133.33%		
7.	Menurunnya Risiko Bencana Alam	Persentase Pembentukan Desa Tangguh Bencana	50	%	0	0	0	0	0.00%	Efisiensi Anggaran	
8.	Meningkatnya Responsibilitas Penanganan Tanggap Darurat	Persentase Kejadian Bencana yang Ditangani Sesuai Waktu Tanggap	85	%	50	28.57	28.57	71.43	84.04%		
9.	Meningkatnya Pemulihan Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana yang Sesuai Standar Kelayakan dan Keselamatan	75	%	0	0	25	45	60.00%	4 jenis infrastruktur perbaikan bersumber dana hibah BNPB akan dilanjutkan tahun berikutnya (Kontrak Tahun Jamak)	

Luwuk, 01 Februari 2021

**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI**



Ir. H. RENSLY SAADJAD, MM
 Nip. 19620317 199003 1 012

**CAKUPAN KINERJA (PK) ESELON IV
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	REALISASI TRIWULAN				CAPAIAN (%)	KETERANGAN
					I	II	III	IV		
1.	Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Materai 3000 dan 6000 yang disediakan	600	Lembar	215	215	600	600	100%	
2.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air, Internet dan TV Kabel yang dibayarkan	3	Rekening	3	3	3	3	100%	Pembayaran Rekening Internet, Listrik dan TV Kabel untuk 12 Bulan
3.	Terpenuhinya Jasa Perizinan/Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah STNK kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat serta Kendaraan Roda Enam yang dibayarkan	0	Unit	0	0	0	0	-	Efisiensi anggaran
4.	Tersedianya Bahan Pembersih dan Tenaga Kebersihan	Jumlah Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	1	Orang	1	1	1	1	100%	Pembayaran Honor Jasa Kebersihan Kantor selama 12 bulan
5.	Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK yang diperlukan	30	Jenis	8	8	23	30	100%	
6.	Tersedianya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan / Fotocopy yang terpenuhi	11820	Lembar	5416	5416	9300	11820	100%	
7.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang diadakan	0	Jenis	0	0	0	0	-	Efisiensi anggaran
8.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar yang digunakan	0	Terbitan	0	0	0	0	-	Efisiensi anggaran

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	REALISASI TRIWULAN				CAPAIAN (%)	KETERANGAN
					I	II	III	IV		
9.	Tersedianya Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang diadakan	507	Dos	0	0	0	507	100%	
10.	Tersedianya Perjalanan Dinas Luar Daerah	Jumlah Perjalanan dinas luar daerah	12	Bulan	3	6	9	12	100%	
11.	Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah	12	Bulan	3	6	9	12	100%	
12.	Terpenuhinya Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Honorer yang dibayarkan	7	Orang	7	7	7	7	100%	Pembayaran Honor Tenaga Honorer selama 12 bulan
13.	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	0	Unit	0	0	0	0	-	Efisiensi anggaran
14.	Tersedianya Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan	0	Unit	0	0	0	0	-	Efisiensi anggaran
15.	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	0	Unit	0	0	0	0	-	Efisiensi anggaran
16.	Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda dua, roda empat dan Roda Enam yang dipelihara	14	Unit	14	14	14	14	100%	
17.	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0	Unit	0	0	0	0	-	Efisiensi anggaran

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	REALISASI TRIWULAN				CAPAIAN (%)	KETERANGAN
					I	II	III	IV		
18.	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	0	Unit	0	0	0	0	-	Efisiensi anggaran
19.	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik	Jumlah jaringan listrik yang dipelihara	0	Jenis	0	0	0	0	-	
20.	Terfasilitasinya ASN yang Purna Tugas	Jumlah Usulan Pegawai yang Purna Tugas yang diajukan tepat waktu	1	Orang	0	0	1	1	100%	
21.	Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen ANJAB , EVJAB , SOP , SKJ yang disusun	3	Dokumen	3	3	3	3	100%	Dok ANJAB, EVJAB, SOP
22.	Tersusunya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD Tepat waktu	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun tepat waktu	1	Laporan	0	1	1	1	100%	
23.	Tersusunya Laporan Keuangan Semesteran Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun tepat waktu	1	Laporan	0	0	1	1	100%	
24.	Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun tepat waktu	1	Laporan	0	0	0	1	100%	
25.	Tersusunya Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD (RKA, RKPA, DPA, DPPA, RENSTA, RENJA) yang disusun tepat waktu	6	Dokumen	3	3	3	6	100%	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	REALISASI TRIWULAN				CAPAIAN (%)	KETERANGAN
					I	II	III	IV		
26.	Tersusunya Dokumen RKBU Tepat Waktu	Jumlah dokumen RKBU yang disusun tepat waktu	2	Dokumen	2	2	2	2	100%	
27.	Tersusunya Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Tepat Waktu	Jumlah laporan Inventarisasi Aset Pemerintah yang disusun tepat waktu tepat waktu	1	Laporan	1	1	1	1	100%	
28.	Tersusunya Profil Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang Disusun	1	Dokumen	1	1	1	1	100%	
29.	Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Musrenbang dan Pengendalian Program Kegiatan	Jumlah laporan Pengendalian Program dan Kegiatan yang disusun	1	Laporan	1	1	1	1	100%	
30.	Terlaksanya Pengembangan Sarana dan Prasarana Peringatan Dini Bencana	Jumlah Peserta yang mengikuti Penyuluhan	0	Orang	0	0	0	0	-	Efisiensi anggaran
31.	Terlaksanya Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kegiatan Dukungan Koordinasi yang diikuti atau dilaksanakan	1	Keg	1	1	1	1	100%	Kegiatan Rakornas BNPB,
33.	Terlaksanya Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk	0	Desa	0	0	0	0	-	Efisiensi anggaran
34.	Terlaksanya Pengembangan Sarana dan Prasarana Peringatan Dini Bencana	Jumlah Laporan Survey dan Monitoring yang dibuat	1	Laporan	0	0	1	1	100%	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	REALISASI TRIWULAN				CAPAIAN (%)	KETERANGAN
					I	II	III	IV		
35.	Terlaksana Pengembangan Sarana dan Prasarana Peringatan Dini Bencana	Jumlah Papan Hibauan/ Jalur Evakuasi yang dibuat	0	Buah	0	0	0	0	-	Efisiensi anggaran
36.	Terlaksana Pemenuhan Sarana dan Prasarana, Personil dan Simulasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana evakuasi yang diadakan	1	Jenis	0	0	0	1	100%	Paket Pengiriman Peralatan Motor Trail TRC dari BNPB
37.	Terlaksana Pemenuhan Sarana dan Prasarana, Personil dan Simulasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Jumlah Kali Penanganan Tanggap Darurat yang ditangani	14	Kali	1	4	4	4	29%	
38.	Tersedianya ketersediaan dan Distribusi Logistik	Jumlah Jenis Sandang, Pangan dan Papan yang disediakan	3	Jenis	0	0	0	3	100%	Paket Sandang, Pangan dan Papan
39.	Terlaksana Pemenuhan Sarana dan Prasarana, Personil dan Simulasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Jumlah Sarana dan Prasarana evakuasi yang dipelihara	0	Jenis	0	0	0	0	-	Efisiensi anggaran
40.	Terlaksana Pemenuhan Sarana dan Prasarana, Personil dan Simulasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Jumlah Peserta yang mengikuti Simulasi	0	Orang	0	0	0	0	-	Efisiensi anggaran
41.	Terlaksana Pemenuhan Sarana dan Prasarana, Personil dan Simulasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Jumlah Honorarium SATGAS/TRC yang dibayarkan	15	Orang	15	15	15	15	100%	Pembayaran Honor SATGAS/TRC selama 12 Bulan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	SATUAN	REALISASI TRIWULAN				CAPAIAN (%)	KETERANGAN
					I	II	III	IV		
42.	Tersedianya ketersediaan dan Distribusi Logistik	Jumlah Koordinasi kedaruratan dan logistik yang dilaksanakan	1	Keg	0	0	1	1	100%	
43.	Terlaksananya Pemenuhan Sarana dan Prasarana, Personil dan Simulasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dilaksanakan	0	Keg	0	0	0	0	-	Efisiensi anggaran
44.	Terlaksananya Monitoring Kerusakan dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana	Jumlah Jenis Infrastruktur perbaikan yang dibangun	4	Jenis	0	0	0	4	45%	4 jenis infrastruktur perbaikan bersumber dana hibah BNPB akan dilanjutkan tahun berikutnya (Kontrak Tahun Jamak)
45.	Terlaksananya Monitoring Kerusakan dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerusakan yang dibuat	1	Laporan	0	0	1	1	100%	
46.	Terlaksananya Penilaian Kebutuhan dan Pemulihan Sosial Ekonomi Pasca Bencana	Jumlah Dokumen JITUPASNA yang disusun	1	Dok	0	0	1	1	100%	

Luwuk, 01 Februari 2021

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BANGGAI

I. H. RENSLY SAAD, MM
 Nip. 19620317 199003 1 012

**CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020**

NO	PROGRAM	KEGIATAN		TARGET	SATUAN	REALISASI TRIWULAN				CAPAIAN (%)	KETERANGAN
		NAMA	INDIKATOR			I	II	III	IV		
1	Pencegahan dan Mitigasi dan Kesiapsiagaan	Penyuluhan dan Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana	Jumlah Peserta yang mengikuti Penyuluhan	0	Orang	0	0	0	0	-	Efisiensi Anggaran
		Koordinasi dukungan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan pra bencana	Jumlah Kegiatan Dukungan Koordinasi yang diikuti atau dilaksanakan	1	Keg	1	1	1	1	100%	Kegiatan Rakomas BNPB
		Pembentukan dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang dibentuk	1	Desa	0	0	0	0	0%	Efisiensi Anggaran
		Survey dan Monitoring Wilayah Rawan Bencana	Jumlah Laporan Survey dan Monitoring yang dibuat	1	Laporan	0	0	1	1	100%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana	Jumlah Papan Hibauan/ Jalur Evakuasi yang dibuat	0	Buah	0	0	0	0	-	Efisiensi Anggaran
2	Kedaruratan dan Logistik	Pengadaan Sarana dan Prasarana evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana evakuasi yang diadakan	1	Jenis	0	0	0	1	100%	Paket Pengiriman Peralatan Motor Trail TRC dari BNPB
		Penanganan tanggap darurat	Jumlah Kali Penanganan Tanggap Darurat yang ditangani	14	Kali	1	4	4	10	71%	
		Pemenuhan kebutuhan dasar tentang sandang pangan dan papan bagi korban bencana alam	Jumlah Jenis Sandang, Pangan dan Papan yang disediakan	3	Jenis	0	0	0	3	100%	Paket sandang, pangan dan papan
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman Korban Bencana Alam	Jumlah Sarana dan Prasarana evakuasi yang dipelihara	0	Jenis	0	0	0	0	-	Efisiensi Anggaran
		Simulasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta yang mengikuti Simulasi	0	Orang	0	0	0	0	-	Efisiensi Anggaran

NO	PROGRAM	KEGIATAN		TARGET	SATUAN	REALISASI TRIWULAN				CAPAIAN (%)	KETERANGAN
		NAMA	INDIKATOR			I	II	III	IV		
		Peningkatan layanan penanggulangan bencana	Jumlah Honorarium SATGAS/TRC yang dibayarkan	15	Orang	15	15	15	15	100%	Pembayaran Honor SATGAS/TRC selama 12 Bulan
		Koordinasi Dukungan kegiatan Kedaruratan dan Logistik	Jumlah Koordinasi kedaruratan dan logistik yang dilaksanakan	1	Keg	0	0	1	1	100%	
		Penguatan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dilaksanakan	1	Keg	0	0	0	0	0%	
3	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Perbaikan Daerah Rawan Bencana	Jumlah Jenis Infrastruktur perbaikan yang dibangun	4	Jenis	0	0	0	4	45%	4 jenis infrastruktur perbaikan bersumber dana hibah BNPB akan dilanjutkan tahun berikutnya (Kontrak Tahun Jamak)
		Monitoring dan Evaluasi Kerusakan Pasca Bencana	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerusakan yang dibuat	1	Laporan	0	0	1	1	100%	
		Peningkatan Kapasitas Pengkajian dan Penilaian Kebutuhan Pasca Bencana	Jumlah Dokumen JITUPASNA yang disusun	1	Dok	0	0	1	1	100%	
4	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai 3000 dan 6000 yang disediakan	600	Lembar	215	215	600	600	100%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Rekening Air, Internet dan TV Kabel yang dibayarkan	3	Rekening	3	3	3	3	100%	Pembayaran Rekening Listrik, Internet dan TV Kabel selama 12 Bulan
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah STNK kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat serta Kendaraan Roda Enam yang dibayarkan	0	Unit	0	0	0	0	-	Efisiensi Anggaran
		penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan yang dibayarkan	1	Orang	1	1	1	1	100%	Pembayaran Honor Jasa Kebersihan Kantor selama 12 bulan

NO	PROGRAM	KEGIATAN		TARGET	SATUAN	REALISASI TRIWULAN				CAPAIAN (%)	KETERANGAN
		NAMA	INDIKATOR			I	II	III	IV		
		penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang diperlukan	30	Jenis	8	8	23	30	100%	
		penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Penggandaan / Fotocopy yang terpenuhi	11820	Lembar	5416	5416	9300	11820	100%	
		Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang diadakan	0	Jenis	0	0	0	0	-	Efisiensi Anggaran
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah Surat Kabar yang digunakan	0	Terbitan	0	0	0	0	-	Efisiensi Anggaran
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang diadakan	507	Dos	0	0	0	507	100%	Efisiensi Anggaran
		Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan dinas luar daerah	12	Bulan	3	6	9	12	100%	
		Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah	12	Bulan	3	6	9	12	100%	
		Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Jumlah Tenaga Honorer yang dibayarkan	7	Orang	7	7	7	7	100%	Pembayaran Honor Tenaga Honorer selama 12 bulan
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	0	Unit	0	0	0	0	-	Efisiensi Anggaran
		Pengadaan Meubelair	Jumlah Meubelair yang diadakan	0	Jenis	0	0	0	0	-	Efisiensi Anggaran
		Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	0	Jenis	0	0	0	0	-	Efisiensi Anggaran
		pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda dua, roda empat dan Roda Enam yang dipelihara	14	Unit	14	14	14	14	100%	
		pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	0	Unit	0	0	0	0	-	Efisiensi Anggaran
		pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	0	Unit	0	0	0	0	-	Efisiensi Anggaran
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan Listrik	Jumlah jaringan listrik yang dipelihara	0	Jenis	0	0	0	0	-	Efisiensi Anggaran

NO	PROGRAM	KEGIATAN		TARGET	SATUAN	REALISASI TRIWULAN				CAPAIAN (%)	KETERANGAN
		NAMA	INDIKATOR			I	II	III	IV		
6.	Fasilitasi Pindah/ Purna Tugas PNS	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Usulan Pegawai yang Purna Tugas yang diajukan tepat waktu	1	Orang	0	0	1	1	100%	
7.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Jumlah dokumen ANJAB , EVJAB , SOP , SKJ yang disusun	3	Dokumen	3	3	3	3	100%	Dok ANJAB, EVJAB, SOP
8.	Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun tepat waktu	1	Laporan	0	1	1	1	100%	
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun tepat waktu	1	Laporan	0	0	1	1	100%	
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun tepat waktu	1	Laporan	0	0	0	1	100%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD (RKA, RKPA, DPA, DPPA, RENSTA, RENJA) yang disusun tepat waktu	6	Dokumen	3	3	3	6	100%	
		Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKBU yang disusun tepat waktu	2	Dokumen	2	2	2	2	100%	
		Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)	Jumlah laporan Inventarisasi Aset Pemerintah yang disusun tepat waktu	1	Laporan	1	1	1	1	100%	
9.	Pengembangan Sistem Informasi / Data	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah yang disusun	1	Dokumen	1	1	1	1	100%	

NO	PROGRAM	KEGIATAN		TARGET	SATUAN	REALISASI TRIWULAN				CAPAIAN (%)	KETERANGAN
		NAMA	INDIKATOR			I	II	III	IV		
10.	Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	Jumlah laporan Pengendalian Program dan Kegiatan yang disusun	1	Laporan	1	1	1	1	100%	

Luwuk, 04 Januari 2021

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI



H. H. RENSLY SAADJAD, MM

Nip. 19620317 199003 1 012

**REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp) TAHUN 2020 Setelah Perubahan	REALISASI TRIWULAN (Rp)				CAPAIAN (%)	KET
				I	II	III	IV		
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,600,000	1,260,000	1,260,000	3,600,000	3,600,000	100.00%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	41,000,000	7,050,182	17,219,536	29,176,204	37,716,311	91.99%	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	-	-	-	-	-	0.00%	
		penyediaan jasa kebersihan kantor	15,000,000	3,495,625	6,495,625	10,998,225	14,998,225	99.99%	
		penyediaan alat tulis kantor	20,000,000	4,998,200	4,998,200	14,994,300	20,000,000	100.00%	
		penyediaan barang cetak dan penggandaan	4,728,000	1,624,800	1,624,800	3,727,600	4,728,000	100.00%	
		Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	-	-	-	-	-	0.00%	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	-	-	-	-	-	0.00%	
		Penyediaan makanan dan minuman	11,765,000	-	-	-	11,715,000	99.58%	
		Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	33,201,472	26,625,230	26,625,230	33,166,430	33,166,430	99.89%	
		Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	135,131,356	40,000,000	40,000,000	50,270,000	135,130,000	100.00%	
		Penyediaan jasa administrasi perkantoran	116,400,000	19,100,000	47,750,000	76,400,000	114,600,000	98.45%	
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan gedung kantor	-	-	-	-	-	0.00%	
		Pengadaan Meubelair	-	-	-	-	-	0.00%	
		Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor	-	-	-	-	-	0.00%	
		pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	45,800,000	13,017,600	21,017,600	38,485,300	45,793,400	99.99%	
		pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	-	-	-	-	-	0.00%	
		pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	-	-	-	-	-	0.00%	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp) TAHUN 2020 Setelah Perubahan	REALISASI TRIWULAN (Rp)				CAPAIAN (%)	KET
				I	II	III	IV		
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan Listrik	-	-			-	0.00%	
3.	Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	1,542,000			1,500,000	1,500,000	97.28%	
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	4,992,000	-		4,896,000	4,896,000	98.08%	
5.	Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	16,520,000	-	10,690,000	14,214,000	16,360,700	99.04%	
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	1,632,000	-		1,632,000	1,632,000	100.00%	
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4,512,900	-			4,484,000	99.36%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	47,907,500	-	13,549,000	38,353,600	47,565,900	99.29%	
		Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah	9,556,000	9,436,800	9,436,800	9,436,800	9,436,800	98.75%	
		Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)	20,556,000	20,318,100	20,318,100	20,318,100	20,318,100	98.84%	
6.	Pengembangan Sistem Informasi/ Data	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	7,356,000	2,344,100	7,152,100	7,152,100	7,152,100	97.23%	
7.	Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	25,011,500	20,000,000	20,000,000	25,011,000	25,011,000	100.00%	
8.	Pencegahan dan Mitigasi dan Kesiapsiagaan	Penyuluhan dan Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana	-	-			-	0.00%	
		Koordinasi dukungan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan pra bencana	75,143,559	75,143,559	75,143,559	75,143,559	75,143,559	100.00%	
		Pembentukan dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana	-	-		-		0.00%	
		Survey dan Monitoring Wilayah Rawan Bencana	5,863,250	-	-	1,863,250	5,863,250	100.00%	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana	-	-			-	0.00%	
9.	Kedaruratan dan Logistik	Pengadaan Sarana dan Prasarana evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam	6,000,000	-			6,000,000	100.00%	
		Penanganan tanggap darurat	6,285,000	-		1,285,000	6,285,000	100.00%	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp) TAHUN 2020 Setelah Perubahan	REALISASI TRIWULAN (Rp)				CAPAIAN (%)	KET
				I	II	III	IV		
		Pemenuhan kebutuhan dasar tentang sandang pangan dan papan bagi korban bencana alam	23,506,000	-		2,570,000	23,503,000	99.99%	
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman Korban Bencana Alam	-	-				0.00%	
		Simulasi Penanggulangan Bencana	-	-				0.00%	
		Peningkatan layanan penanggulangan bencana	358,400,000	59,300,000	145,250,000	231,200,000	350,800,000	97.88%	
		Koordinasi Dukungan kegiatan Kedaruratan dan Logistik	3,726,500	-		3,725,000	3,725,000	99.96%	
		Penguatan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana	-			-		0.00%	
10.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Perbaiki Daerah Rawan Bencana	12,990,000,000	-	-	179,618,167	6,720,109,532	51.73%	
		Monitoring dan Evaluasi Kerusakan Pasca Bencana	3,284,460	-		3,284,000	3,284,000	99.99%	
		Peningkatan Kapasitas Pengkajian dan Penilaian Kebutuhan Pasca Bencana	1,285,000	-		1,285,000	1,285,000	100.00%	
TOTAL			14,039,705,497	303,714,196	468,530,550	883,305,635	7,755,802,307	55.24%	

Luwuk, 04 Januari 2021

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BANGGAI

Dr. H. RENSILY SAADJAD, MM
 Nip. 19620317 199003 1 012